*QUO VADIS* DANA FLOAT: KURANGNYA PAYUNG HUKUM DALAM SISTEM KEPAILITAN DI INDONESIA

**Haura Atthaya Salsabilla**[[1]](#footnote-0)\* **dan Pramita Putri Rahmadhani**[[2]](#footnote-1)\*\*

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

***Abstract***

*The rapid development of financial digitalization in Indonesia has prompted the financial sector to continuously innovate in improving access to finance, one of which is through float funds. The growth of float funds as a payment instrument faces several challenges, especially in addressing the potential bankruptcy risks that may occur with electronic money issuers. In an effort to protect consumers using electronic money, measures such as expanding the authority of the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), which originally focused on protection in the banking sector, become relevant to non-bank institutions. Therefore, stricter and clearer regulations related to float funds are needed to provide certainty for users of financial technology in Indonesia.*

***Keywords:*** *Electronic Money, Dana Float, Bankruptcy, Payment Instrument.*

**Intisari**

Perkembangan pesat digitalisasi keuangan di Indonesia telah mendorong sektor keuangan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan akses keuangan, salah satunya melalui dana *float.* Pertumbuhan dana *float* sebagai instrumen pembayaran menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam mengatasi potensi risiko kepailitan yang mungkin terjadi pada penerbit uang elektronik. Dalam upaya untuk melindungi konsumen yang menggunakan uang elektronik, langkah-langkah seperti memperluas kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang awalnya fokus pada perlindungan di sektor perbankan, menjadi relevan untuk lembaga non-bank. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih ketat dan jelas terkait dengan dana *float,* yang memberikan kepastian bagi pengguna teknologi keuangan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Uang Elektronik, Dana *Float*, Kepailitan, Instrumen Pembayaran.

### A. Pendahuluan

1. **Latar Belakang**

Perkembangan digitalisasi membawa dampak pada teknologi keuangan, terutama meningkatnya metode pembayaran dengan uang elektronik atau *e-money.* Uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang dapat disimpan dalam bentuk elektronik dan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer elektronik atau menggunakan kartu prabayar.[[3]](#footnote-2) Pembayaran yang menggunakan uang elektronik ini populer karena beberapa faktor, seperti fleksibilitas, percepatan transaksi, dan keamanan. Metode ini memberikan kemudahan kepada pengguna karena dapat digunakan secara fleksibel, serta penggunaannya dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan platform pembayaran, serta dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi. Selain itu, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan singkat dan praktis, baik untuk pembelian secara langsung maupun daring tanpa harus membawa uang tunai. Aspek keamanan juga menjadi faktor penting karena uang elektronik menggunakan teknologi enkripsi yang canggih untuk melindungi informasi keuangan pengguna dan transaksi yang dilakukan. Selain itu, *e-money* juga memberikan kemudahan dalam mengelola transaksi keuangan, yang membuatnya semakin diminati oleh masyarakat.

Dalam menggunakan uang elektronik, pengguna harus menyimpan atau mendepositokan sejumlah uang yang akan ditahan oleh penyedia layanan uang elektronik sebagai pengaman atau jaminan selama proses transaksi. Hal inilah yang selanjutnya disebut sebagai dana *float.* Cara kerja uang elektronik terkait dengandana *float* dimulai ketika pengguna melakukan transaksi menggunakan uang elektronik. Jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi tersebut akan didebet dari saldo pengguna, tetapi dana *float* yang setara dengan nilai transaksi akan ditahan oleh penyedia layanan uang elektronik selama transaksi berlangsung. Setelah transaksi selesai atau dibatalkan, dana *float* akan dikembalikan ke penyedia layanan uang elektronik. Dana *float* bertindak sebagai jaminan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk transaksi tersedia sebelum transaksi selesai. Hal ini akan melindungi penyedia layanan *e-money* dari risiko keuangan dan memastikan kelancaran operasional sistem uang elektronik.

Uang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. UU Nomor 7 Tahun 2011 menjadi dasar hukum pengaturan uang elektronik di Indonesia, termasuk mengenai izin penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia. Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengatur mengenai penyelenggaraan uang elektronik secara lebih rinci yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Selain itu, terdapat peraturan lain terkait yang dikeluarkan Bank Indonesia, yakni PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana. Peraturan ini turut mengatur aspek-aspek terkait uang elektronik, termasuk ketentuan tentang kebijakan operasional, kewajiban penyimpanan data, pelaporan transaksi, serta mekanisme pengawasan dan audit.

Namun, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik tidak mengatur beberapa hal krusial mengenai perlindungan konsumen, penjaminan dana float, dan potensi risiko likuiditas. PBI Uang Elektronik belum sepenuhnya mengatur perlindungan konsumen secara komprehensif dalam hal penggunaan uang elektronik, termasuk penggunaan dana *float*. Meskipun terdapat ketetapan mengenai pengelolaan dana *float* yang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci terkait perlindungan konsumen terkait dana *float,* seperti risiko kehilangan dana *float* akibat kebangkrutan penyelenggara uang elektronik. Dalam konteks peraturan terkait kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lembaga nonbank yang mengalami kepailitan akan kehilangan hak atas seluruh harta kekayaannya. Hal ini berlaku baik sebelum putusan pengadilan maupun setelah putusan pengadilan, ketika lembaga non bank tersebut dinyatakan berada dalam sita umum yang akan diproses oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Selain itu, PBI Uang Elektronik tidak mewajibkan penyelenggara uang elektronik untuk menyediakan penjaminan terhadap dana *float* yang digunakan. Jika terjadi kebangkrutan penyelenggara uang elektronik, dana *float* yang digunakan oleh pengguna uang elektronik dapat menjadi risiko dan mungkin sulit untuk dikembalikan atau dilindungi. PBI Uang Elektronik juga memiliki risiko likuiditas, terutama jika dana *float* yang digunakan oleh penyelenggara uang elektronik tidak dikelola dengan baik atau jika terjadi ketidakseimbangan antara dana *float* yang digunakan dan kewajiban yang harus diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang ada, Penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu; **Pertama,** bagaimana status dana *float* ketika lembaga non-bank pada lembaga *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech)*, berada dalam status kepailitan? Rumusan ini akan membahas mengenai dana *float*, bagaimana sistem kepailitan pada fintech dilakukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dana *float* fintech pada sistem kepailitan. **Kedua,** bagaimana cara mengoptimalkan status dana *float* pengguna *fintech* ketika menghadapi situasi pailit untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam industri *fintech?*Rumusan ini akan membahas mengenai penggunaan dana *float* fintech melalui perbandingan dengan negara lain dan tinjauan solusi demi meningkatkan efisiensi dan keamanan pada sistem *fintech.*

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif.[[4]](#footnote-3) Dimana penelitian dilakukan dengan pengkajian atas norma dan dasar hukum tertulis. Prosedur pengumpulan data penelitian melalui studi pustaka, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal, norma, doktrin, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan uang elektronik serta kepailitan. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggara uang elektronik, pengaturan dana *float,* dan kepailitan. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan perbandingan *(comparative approach),* yaitu melalui pendekatan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya mengenai kepailitan dan perbandingan penyelesaian kasus atau peristiwa yang terjadi di luar negeri dengan kebijakan negara masing-masing.

Keseluruhan data dikumpulkan untuk dianalisis melalui teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis,[[5]](#footnote-4) memahami, dan mengkaji kondisi pada status quo untuk dapat dirumuskan. Pada bagian awal, Penulis mengumpulkan permasalahan dan menggambarkan untuk dapat disadari urgensi yang ada yang dilanjutkan dengan analisis dan pengkajian melalui peraturan perundang-undangan maupun data lain untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang menjadi urgensi tersebut.

### 

### B. Pembahasan

1. **Pengertian Dana Float dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pengaturan dana *float* di Indonesia pastinya akan diatur lebih dalam oleh Bank Indonesia sebagai lembaga legislatif keuangan Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) merupakan peraturan utama yang menjadi acuan terkait dana *float* di Indonesia. Kurangnya pengaturan akan dana *float* terjadi karena masih cukup awam pengetahuan di masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum akan dana *float*. Akibat dari kurangnya pengaturan ini menyebabkan peraturan *a quo* kurang memadai dalam menyelesaikan permasalahan dana *float* yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang.

PBI Uang Elektronik menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan uang elektronik, terutamanya dana *float.* Berdasarkan Pasal 1 peraturan *a quo*, dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa frasa “kewajiban” secara eksplisit menjelaskan bahwa penerbit harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada uang elektronik yang dimiliki pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Penerbit sebagai tempat pemberi jasa yang dipercaya oleh pengguna untuk menyimpan hartanya dalam bentuk uang elektronik. berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 unsur dari dana *float*, yaitu:

1. Seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit merupakan penguasaan langsung dari penerbit;
2. Seluruh nilai uang elektronik merupakan konsekuensi bagi penerbit berupa kewajiban bagi pengguna uang elektronik dan penyedia barang atau jasa; dan
3. Nilai uang elektronik dapat dipindahkan kapan jasa oleh pengguna uang elektronik dan penyedia barang atau jasa dimanapun melalui transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.[[6]](#footnote-5)

Pencatatan dana *float* oleh penerbit dilakukan sesuai yang diatur dalam PBI Uang Elektronik. Dana *float* wajib dicatat pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva. Bank Indonesia sebagai *policy maker* menghendaki dana *float* ditempatkan pada beberapa tempat yang berbeda. Minimal 30% (tiga puluh persen) dari dana *float* wajib ditempatkan pada kas atau giro di bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4. Selanjutnya, minimal 70% (tujuh puluh persen) dari dana *float* ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau rekening di Bank Indonesia.[[7]](#footnote-6)

Selain pencatatan, penggunaan dana *float* juga diperhatikan untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang atau jasa. Dalam hal ini, penerbit memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dana *float;*
2. Memiliki sistem dan mekanisme *monitoring* ketersediaan dana *float;*
3. Memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu;
4. Mencatat dana *float* secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh penerbit;
5. Menempatkan dana *float* pada rekening yang terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh penerbit; dan
6. Menempatkan dana *float* pada rekening yang terpisah dari rekening operasional penerbit.[[8]](#footnote-7)

Peningkatan modal disetor wajib dilakukan sebanding dengan peningkatan dana *float* yang dimiliki penerbit berupa lembaga selain bank. Peningkatan ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
2. apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
3. apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 3% (tiga persen) dari nilai dana *float*.[[9]](#footnote-8)

Apabila melihat dari beberapa ketentuan pada PBI Uang Elektronik, Bank Indonesia secara implisit mengatur terkait bagaimana pengelolaan dana *float* berfokus pada kepentingan penerbit maupun pengguna uang elektronik. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pencatatan dana *float* yang mewajibkan adanya pemisahan penempatan dana *float.* Penempatan dana *float* ini berada pada rekening tersendiri yang terpisah dari rekening operasional lainnya. Penulis beranggapan bahwa maksud dan tujuan Bank Indonesia mengatur demikian dapat menjadi awal solusi permasalahan apabila terjadi kepailitan pada badan hukum milik penerbit.

Walaupun demikian, pengaturan terkait dana *float* dalam PBI Uang Elektronik tidak dapat dipungkiri belum memenuhi kebutuhan atas permasalahan yang ada pada masa sekarang maupun yang akan datang. Permisalan apabila terjadi kepailitan akan sangat merugikan pengguna uang elektronik dari suatu penerbit karena tidak adanya pengaturan terkait pemisahan dana *float* dari harta pailit yang akan diakumulasikan oleh Kurator. Permasalahan ini akhirnya menjadi pertanyaan baru bagaimana Bank Indonesia sebagai legislator sistem keuangan di Indonesia dapat menangani kekosongan hukum atas kepailitan dalam lembaga keuangan nonbank yang memiliki dana *float.*

Dalam pengaturan terbaru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membentuk bagian sendiri perihal *financial technology*, yaitu Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Dana *float* merupakan salah satu ruang lingkup dalam ITSK yang termasuk dalam sistem pembayaran. Penyelenggaraan dana float harus menerapkan prinsip, berupa:

1. Tata kelola;
2. Manajemen risiko;
3. Keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
4. Perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi; serta
5. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[10]](#footnote-9)

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan inovasi (*sandbox*) terhadap penyelenggara ITSK. Apabila suatu layanan atau produk telah lulus dari *sandbox*, maka penyelenggara dana *float* akan mendapatkan perizinan dari OJK atas produk terkait.[[11]](#footnote-10) Lebih lanjut, ITSK belum banyak diatur dalam hukum positif di Indonesia saat ini karena tergolong baru, tetapi akan diatur dalam peraturan turunan di OJK dan Bank Indonesia kedepannya.

1. **Sistem Kepailitan pada Penyelenggara Dana *Float* yang Dilakukan di Indonesia**

Pengaturan mengenai bagaimana proses kepailitan pada penyelenggara dana *float* dilakukan sampai saat ini belum diatur secara khusus. Proses kepailitan dana *float* di Indonesia dapat mengklasifikasikan terlebih dahulu termasuk kelompok apakah penyelenggara dana *float* tersebut. Bank Indonesia telah mengategorikan *financial technology* ke dalam empat kelompok, yakni:

1. Pembayaran, *Settlement*, dan Kliring;
2. *Market aggregator*;
3. Manajemen Risiko dan Investasi; serta
4. *Peer to Peer Lending* (P2P *Lending*).[[12]](#footnote-11)

Dana *float* sebagai salah satu bentuk cara dalam sistem pembayaran di fintech termasuk ke dalam kelompok pembayaran, settlement, dan kliring. Dari hal ini, diketahui bahwa penyelenggara dana *float* merupakan badan hukum yang dapat berupa lembaga keuangan bank maupun non bank.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengkategorikan perusahaan *fintech* yang berfokus pada sistem pembayaran seperti Gopay dan Dana tidak termasuk likuiditas perbankan. Hal ini karena transaksi yang terjadi dalam dana *float* tersebut relatif kecil sehingga tidak perlu diadakannya penjamin simpanan. Terlebih, sistem pembayaran *online* tersebut merupakan alat pembayaran nontunai yang berasal dari rekening bank. LPS menganggap alat pembayaran ini merupakan satu bagian dalam sistem yang ada di bank. Atas siklus tersebut, LPS menganggap kurang pentingnya penyelenggara *fintech* untuk mendapatkan penjaminan simpanan.

Merujuk pada hukum positif di Indonesia terkait kepailitan, terdapat tiga syarat yang menyatakan suatu badan hukum mengalami kepailitan, yaitu:

1. Adanya dua kreditor atau lebih (*concursus creditorum*);
2. Harus adanya utang; dan
3. Adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), minimal terdapat dua kreditor sebagai syarat dinyatakan pailit diatur secara eksplisit. Kreditor tunggal dianggap tidak memiliki masalah besar apabila terjadi kepailitan karena tidak perlu adanya perebutan harta milik debitur oleh kreditur. Terlebih, pembagian piutang kreditur secara pronata juga tidak akan terjadi yang secara jelas menunjukkan debitur tidak dapat dituntut pailit jika hanya terdapat satu kreditur saja.

Kreditur dalam Hukum Kepailitan terbagi menjadi tiga macam. Pertama, Kreditur konkuren, kreditur yang memiliki hak pari passu dan prorata. Hal ini menyebabkan para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama untuk melunasi utangnya dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan terlebih dahulu. Kedua, kreditur preferen, kreditur yang diistimewakan oleh untung-undang karena sifat piutangnya. Akibat dari ini, kreditur preferen bisa mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari harta debitur. Ketiga, kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, seperti gadai dan hipotik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Utang harus dimiliki debitur kepada kreditur untuk dapat mengajukan kepailitan. Utang merupakan kewajiban debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur karena timbul akibat suatu perjanjian tertentu. Kepailitan diajukan terhadap debitur yang tidak dapat membayarkan lagi hutangnya kepada kreditur. Ketidakbisaan debitur dalam melakukan kewajiban membayar kepada debitur merupakan kontraprestasi dari debitur kepada kreditur. Apabila debitur tidak dapat membayarkannya, maka debitur seyogyanya harus mengajukan kepailitan agar terhindar dari kewenangan kreditur dalam mengambil harta untuk membayarkan kewajiban milik debitur.

Utang yang dimiliki debitur tersebut minimal satu utang harus telah jatuh waktu dapat ditagih pembayarannya oleh kreditur. Syarat ini merupakan rujukan dari Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dimana terdapat frasa “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana maka sudah dapat diajukan permohonan pailit”. Frasa tersebut menunjukkan secara implisit bahwa terdapat fakta yang terbukti walaupun hanya ada satu utang yang telah jatuh waktu.

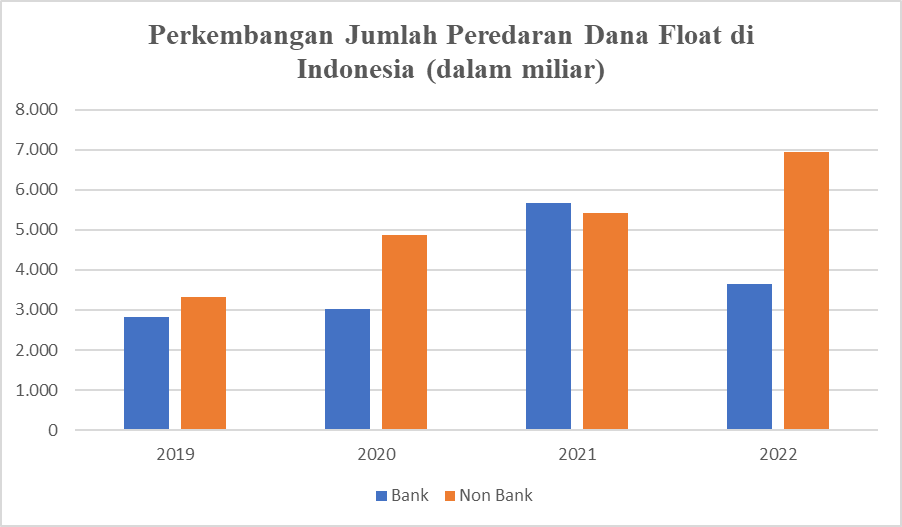
Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri, seorang kreditur atau lebih, atau kejaksaan.[[13]](#footnote-12) Debitur dapat mengajukan permohonan pailit secara sendiri selama diajukan atas persetujuan pasangannya. Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pailit harus dilandaskan pada kepentingan umum, seperti debitur melarikan diri, penggelapan uang, utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sebagainya. Permohonan pailit oleh kejaksaan baru dapat dilakukan apabila debitur yang terdapat minimal 2 kreditur tidak dapat membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Pengajuan permohonan pailit diajukan tergantung jenis lembaga yang mengalami pailit tersebut. Penyelenggara dana *float* di fintech termasuk ke dalam perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, di mana permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam). Setelah pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Ketua Pengadilan setempat, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. UU Kepailitan mengatur terkait kewenangan relatif dari pengadilan mana yang akan mengadakan sidang pernyataan pailit. Setelah sidang dilakukan, hakim akan memutus apakah entitas hukum terkait yang mengajukan permohonan pailit tersebut akan diterima atau tidak. Putusan pailit sejatinya digunakan sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitur dan agar tidak terjadi perebutan harta kekayaan oleh kreditur. Putusan pernyataan pailit yang sudah dijatuhkan kepada debitur akan menghilangkan hak menguasai dan mengurus harta karena akan dimasukkan dalam harta pailit.[[14]](#footnote-13) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa seluruh kekayaan milik debitur akan masuk ke dalam harta pailit,[[15]](#footnote-14) kecuali yang diatur dalam Pasal 22 peraturan *a quo*.

1. **Keterkaitan Hukum Positif di Indonesia dengan Permasalahan Kepailitan pada Dana *Float* di Perusahaan *Fintech***

Tabel 1

Perkembangan Dana *Float* pada Bank dan Nonbank (dalam miliar)

Sumber: Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) periode Maret 2023.[[16]](#footnote-15)

Peredaran dana *float* yang ada di Indonesia antara penerbit bank dan nonbank terlihat sangat signifikan. Permasalahan muncul ketika lembaga nonbank yang mengedarkan dana *float* lebih besar, tetapi tidak ternaungi keamanan pelanggannya dari LPS. Pelanggan sebagai penikmat layanan dana *float* dari penerbit nonbank akan merasa uang elektroniknya tidak aman karena ditakutkan kedepannya apabila terjadi kepailitan pada penerbit maka uang tersebut akan hilang.

Melihat jumlah uang yang beredar pada dana *float* terus terjadi peningkatan setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat atas adanya dana *float* sangatlah tinggi sehingga perlu adanya kepastian hukum atas apa yang mungkin terjadi kedepannya, terutama terkait kepailitan. Terlihat pada Tabel 1.0, perbandingan dana *float* antara bank dan nonbank cukup signifikan. Apabila dilihat pada tahun 2022, jumlah dana float yang beredar pada non bank sangat meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan, data bulan Januari hingga Februari tahun 2023 terjadi peningkatan dana *float* yang lebih signifikan hingga mencapai hampir 8 triliun untuk bulan Februari. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan intensi masyarakat atas penggunaan layanan dana *float* di lembaga non bank. Namun, berbanding terbalik dengan kenaikan intensi masyarakat, perlindungan hukum atas layanan dana *float* masih kurang di Indonesia.

Proses kepailitan yang terjadi pada perusahaan *fintech* masih dipertanyakan, terutama yang termasuk dalam kelompok pembayaran, *settlement*, dan kliring. Peraturan perundang-undang di Indonesia dan turunannya belum mengatur secara khusus terkait bagaimana jika kepailitan terjadi pada perusahaan *fintech* yang menyelenggarakan dana *float*. Harta kekayaan penerbit ditakutkan akan masuk ke dalam boedel pailit semua hingga mengorbankan uang elektronik milik pelanggan. Apabila hal ini terjadi, maka pelanggan akan sangat dirugikan karena harus merelakan hartanya untuk pembayaran utang milik penerbit alias debitur.

Berbeda dengan lembaga nonbank yang tidak ada kewajiban mendaftarkan diri di LPS, lembaga bank wajib melakukan pendaftaran kepada LPS sebagai syarat pembentukan suatu bank.[[17]](#footnote-16) Simpanan nasabah bank yang dijamin oleh LPS berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya.[[18]](#footnote-17) Bentuk lainnya tersebut dapat memberikan arti bahwa seharusnya perusahaan *fintech* sebagai penyelenggara dana *float* juga berhak mendapatkan penjaminan simpanan bagi pengguna karena uang elektronik dapat disamakan dengan tabungan dengan bentuk lainnya, yaitu tabungan *online*. LPS menjamin nilai simpanan seorang nasabah pada satu bank dengan nilai maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[[19]](#footnote-18) Apabila mencontoh atas peraturan ini, perusahaan *fintech* seharusnya juga dapat menerima jaminan simpanan bagi nasabahnya sejumlah sama yang ada di lembaga bank. Hal ini karena keduanya terdapat kesamaan berupa bentuk tabungan milik nasabah atau pengguna.

Kesenjangan payung hukum antara lembaga bank dan nonbank sebagai penyelenggara dana *float* oleh LPS terjadi karena beberapa hal. Pertama, *financial technology* yang masih tergolong baru di Indonesia sehingga masih terdapat penyesuaian peraturan terlebih dahulu oleh lembaga legislatif. Kedua, LPS menganggap nilai dana *float* yang ada pada masyarakat relatif kecil dibandingkan dengan jumlah dana penjamin simpanan yang harus dikeluarkan oleh LPS. Ketiga, seluruh kegiatan dana *float* yang berada di *fintech* berasal dari rekening bank. Hal ini membuat LPS merasa cukup apabila hanya menjaminkan simpanan milik nasabah di bank saja. Ketiga alasan tersebut secara *a contrario* menjelaskan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam memajukan perkembangan fintech yang ada di tengah gempuran globalisasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mulai memberikan celah pembaharuan hukum bagi uang elektronik, terutama pada penyelenggara dana *float*. Dana yang sudah dipisahkan sebelumnya dalam proses pendaftaran lembaga keuangan yang diatur pada PBI Uang Elektronik terjawab keberlanjutannya di UU PPSK. Kepailitan tidak meliputi dana yang sudah dipisahkan sebelumnya oleh penerbit uang elektronik (debitur) untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna jasa dana *float*.[[20]](#footnote-19) Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban penerbit kepada pengguna jasa dari penyelenggaraan dana *float* yang ada.[[21]](#footnote-20) Atas adanya peraturan ini, penyelenggara uang elektronik yang memiliki layanan dana *float* dapat melindungi uangnya agar aman dari tersedot secara menyeluruh ke dalam boedel pailit. Dana *float* nantinya tetap akan menjadi harta nasabah yang akan diprioritaskan ketika terjadi kepailitan pada penyelenggara uang elektronik.

Walaupun demikian, payung hukum kepailitan pada penyelenggara dana *float* di Indonesia dirasa masih sangat kurang dalam menjamin harta milik pengguna. Pengaturan pembaruan yang dapat memadai permasalahan pailit dalam dunia *fintech* dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Dengan demikian, pemerintah sebagai legislator diharapkan dapat memperbarui peraturan yang ada agar sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi saat ini.

1. **Perbandingan Sistem Kepailitan Antarnegara**

PBI Uang Elektronik pada Pasal 6 menerangkan bahwa pihak atau lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara uang elektronik harus berbentuk bank atau lembaga selain bank, yang berbentuk Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk lembaga selain bank yang berbentuk Perseroan Terbatas ini untuk mengalami resiko-resiko baik likuiditas risiko kredit, risiko hukum, dan risiko operasional.

Pertumbuhan jenis penerbit uang elektronik zaman ini dipenuhi dengan 2 jenis model, yakni yang berbentuk *chip based* dan *server based.* Jenis uang elektronik yang berbentuk *chip based* biasanya dapat ditemukan yang diterbitkan oleh Bank, seperti Flazz dari BCA, Brizzi dari BRI dan MTT dari PT MRT sedangkan jenis uang elektronik yang berbentuk *server based* dapat ditemukan di berbagai aplikasi di smartphone seperti LinkAge, Gopay, Shopeepay, dan Dana.[[22]](#footnote-21)Untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut, diperlukan regulasi mengenai kepailitan ini perlu diatur agar mencegah langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan tidak merugikan dari pemilik dana *float*.

Negara-negara lain telah mengantisipasi risiko uang pengguna yang bisa saja masuk ke dalam boedel pailit ketika terjadi kebangkrutan uang lembaga elektronik dengan mewajibkan penerbit uang elektronik untuk menyediakan dan menyimpan uang dengan jumlah yang setara dengan dana di uang elektronik ke dalam aset yang terjamin aman. Namun, beberapa negara terutama di Eropa memiliki mekanisme lain dengan mewajibkan penerbit untuk menempatkan dana penggunaan dalam asuransi swasta.[[23]](#footnote-22) Akan tetapi, mekanisme ini sendiri tidak cukup untuk bisa menjaga dana yang dimiliki pengguna untuk tidak masuk ke dalam *boedoel* pailit jika terjadi risiko *insolvency*. Mengingat, PBI Uang Elektronik sendiri menurut ketentuan dana *float* tentang pencatatan, penempatan, penggunaan, dan larangan, tetapi tidak mengatur terkait pembatasan. Dengan begitu, dana ini sangat dimungkinkan untuk tidak akan disentuh ketika terjadi kebangkrutan.

Agar dana float terhindar dari resiko kepailitan, beberapa negara telah mengatur dengan regulasi *ring fence,* dimana sejumlah uang dipindahkan ke dalam aset perusahaan utama atau dana individu agar suatu saat terjadi kerugian operasional, sejumlah uang ini tidak akan kena dampak ketika dihadapi dengan risiko-risiko yang ada. [[24]](#footnote-23) Beberapa negara tersebut, yakni: [[25]](#footnote-24)

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat mengadopsi konsep pendekatan *trust* dimana penerbit akan memberikan kewenangan kepada *trustee*  untuk menyimpang dana *float* atas nama pengguna uang elektronik dengan kepemilikan masih tetap menjadi milik pengguna uang elektronik. Uang yang telah disimpan *trustee* tidak akan menjadi milik penerbit uang elektronik, tetapi tetap menjadi aset penerbit uang elektronik itu sendiri. Regulasi yang mengatur konsep *trust* di Amerika Serikat terdapat dalam Uniform Money Service Act and FDIC Notice of New General Counsel’s Opinion.

1. Uni Eropa

Uni Eropa telah memberlakukan beberapa ketentuan terkait dana *float*. Salah satunya ialah regulasi dimana seluruh dana pengguna uang elektronik akan disimpan dalam rekening yang terpisah atau di investasi dalam aset yang likuid dan aman, seperti surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga dana float akan terisolasi dari rekening penerbit uang elektronik. Mekanisme lain yakni dengan pemberian jaminan kepada pengguna dengan adanya asuransi simpanan yang jumlah dana yang diberikan juga akan dibatasi. Agar menjamin pengguna uang elektronik menggunakan uang elektronik, Uni Eropa telah menetapkan minimal modal awal pembentukan yakni EUR 350.000 yang diikuti keuntungan 2% dari uang elektronik yang telah beredar.[[26]](#footnote-25)

1. Filipina

Filipina memberikan kesempatan pada penerbit uang elektronik untuk selalu memiliki aset likuid atau kekayaan dan harta milik perusahaan penerbit yang dapat dicairkan sewaktu-waktu menjadi uang tunai ketika dibutuhkan.[[27]](#footnote-26) Aset likuid ini dapat berupa investasi di bank dalam bentuk deposito, obligasi maupun surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.

1. Australia

Di Australia, perusahaan *fintech* diharuskan untuk mematuhi aturan pengelolaan dana terpisah *(segregated account)* dan menempatkan dana nasabah pada rekening terpisah yang diawasi oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Selain itu, Australian Prudential Regulation Authority (APRA) juga mengawasi dan menetapkan persyaratan untuk perusahaan fintech yang menyimpan dana nasabah.

1. Kenya

Sama seperti Amerika Serikat, Kenya juga menjamin dana pengguna uang elektronik dengan konsep *trustee.* Penerbit uang elektronik harus memisahkan dana penggunaan uang elektronik di *trustee.* Bahkan, uang tersebut juga tidak menjadi hak milik dari *trustee* itu sendiri. Jika terjadi kepailitan, dana ini tidak dapat disentuh dan menjadi boedel pailit yang dapat dicairkan oleh kurator. Selain menggunakan *trustee* itu sendiri, penerbit di Kenya juga menjamin uang penggunaannya dengan adanya asuransi secara tidak langsung *(pass-through)*. Penerbit uang elektronik juga harus mendiservikasi dananya dalam beberapa lembaga keuangan, setidaknya di satu bank yang memiliki kekuatan dan diverifikasi setidaknya di empat bank. Dengan begitu, uang milik nasabah akan terjaga ketika terjadi risiko kepailitan.[[28]](#footnote-27)

Selain cara untuk mencegah risiko kepailitan bagi pengguna regulator *fintech*, terdapat beberapa pendekatan untuk melindungi pengguna uang elektronik dari risiko kepailitan. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh negara lain yang pertama ialahasuransi simpanan**.** Beberapa negara telah menggunakan pendekatan ini untuk meninjau dan memberikan keamanan pada pengguna uang elektronik yakni dengan mengasuransikan simpanan. Negara yang menggunakan metode ini menyimpan dana pengguna uang elektronik dalam bentuk asuransi simpanan. Dalam beberapa kasus, asuransi pinjaman tidak memberikan perlindungan akan dana pengguna secara menyeluruh lakukan sesuai dengan batas pertanggungan dan volume dana operasional penyelenggara uang elektronik. Maka dari itu, pendekatan ini sendiri dirasa tidak cukup untuk menjamin dari uang pengguna tidak masuk dalam boedel pailit ketika terjadi risiko *insolvency*.

Mekanisme yang kedua,yakni memperkuat persyaratan modal bagi penerbit uang elektronik. Mekanisme terkait persyaratan modal bagi penerbit uang elektronik ini harus menjadi dasar yang kuat bagi pelaku *Fintech* dikarenakan penerbitan uang elektronik harus memiliki dasar dan dana untuk menjalankan operasional kegiatan. Mekanisme yang ketiga,persyaratan yang terdiversifikasi, yaitu penerbit uang elektronik meletakkan dana elektronik dalam beberapa tempat atau lembaga keuangan. Hal ini diperuntukkan demi mencegah terjadinya kebangkrutan dan meminimalisir dana pengguna masuk ke dalam boedel pailit.

1. **Mekanisme Solusi**

Kegiatan menerbitkan uang elektronik dalam regulasi *a quo* dapat dilakukan oleh bank dan lembaga non bank. Dalam peraturan *a quo* juga disebutkan bahwa lembaga nonbank yang berhak untuk menerbitkan uang elektronik adalah lembaga yang berbentuk perseroan terbatas. Maka dari itu, peluang untuk terjadinya kebangkurutan ini sangat dimungkinkan. Ketika dihadapi dengan risiko kepailitan, seluruh kekayaan yang debitor yang ada saat putusan pernyataan pailit hingga diperoleh merupakan harta yang dapat masuk boedel pailit. Hal ini memungkinkan untuk dana *float* bisa masuk ke dalam boedel pailit, yang mana ketika dana ini sudah masuk ke dalam boedel pailit harus mengikuti kepengurusan yang sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Ketika sebuah perusahaan menghadapi risiko *insolvency* atau pailit, maka semua aset perusahaan akan diambil alih oleh pengadilan dan dijual untuk membayar hutang-hutang yang belum dilunasi. Termasuk di dalam aset perusahaan adalah dana *float* yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun dana *float* sebenarnya dimiliki oleh pelanggan yang telah melakukan pembayaran, pengadilan dapat mengambil alih dan menjual dana tersebut untuk membayar hutang-hutang perusahaan yang belum terbayar. Hal ini karena dalam proses boedel pailit, semua aset perusahaan akan dijual untuk membayar hutang-hutang yang belum dilunasi dan semua kreditur harus bersedia menerima sebagian dari jumlah yang terutang.

Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme solusi yang cocok bagi Indonesia ketika terjadi risiko *insolvency* mengancam penerbit uang elektronik. **Pertama**, adanya kekosongan hukum terkait bagaimana dana *float* yang dimiliki oleh nasabah dapat masuk ke dalam boedel pailit, maka tentunya diharapkan bagi pemerintah untuk dapat mengeluarkan pengaturan terutama perlindungan bagi pengguna uang elektronik yang mana dapat membatasi dana yang ada pada uang elektronik untuk tidak dapat ditarik dalam boedel pailit ketika terjadi insolvensi.

**Kedua**, pemerintah dapat memberikan kewenangan pada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mana tugasnya adalah menjamin simpanan nasabah. Namun, mekanisme ini hanya bisa dilakukan dalam dana *float* yang tersimpan dalam bentuk bank dan tidak berlaku bagi lembaga non bank. Hal ini menciptakan ketidakpastian terutama bagi pengguna uang elektronik ketika penerbit uang elektronik dihadapi ancaman kepailitan. Menurut penulis, LPS juga harus bisa menjamin dana *float* pada *fintech* dari risiko kepailitan. Pentingnya, menjaga dana *float* ini agar terhindar dari segala macam resiko baik likuiditas, kredit, hukum, maupun operasional dikarenakan pertumbuhan dana *float* di Indonesia yang terus berkembang dari masa ke masa.

1. **Tinjauan Solusi**

Indonesia dalam regulasinya yang paling terbaru di UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Bab VIB tentang Ketentuan Terkait Kepailitan dalam Pasal 35D dituliskan: *“Terhadap* debitur *yang merupakan penerbit uang elektronik, kepailitan tidak meliputi dana yang telah dipisahkan oleh penerbit guna memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.”*

Pasal tersebut semakin menegaskan ketentuan tentang pengaturan mengenai debitur sebagai penerbit uang elektronik yang ketika dihadapi resiko kepailitan.Namun, ketentuan ini tidak menjawab apakah dana *float* dapat dicegah masuk ke dalam boedel pailit ketika terjadi resiko kepailitan, mengingat kepailitan terjadi ketika seluruh harta debitur pailit masuk ke dalam sita umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh kurator.[[29]](#footnote-28)

Pasal *a quo* belum dirasa cukup sebagai salah satu metode pencegahan masalah. Hal dikarenakan pasal 48 PBI 20/2018 tidak mengkategorisasikan bagaimana pembagian dana *float* milik pengguna untuk tidak digunakan atau diperuntukan sebagai hal lain ataupun masuk ke dalam boedel pailit ketika dihadapi risiko *insolvency*.

Regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) di pasal 35D tidak dijelaskan secara rinci apakah dana yang telah dipisah dari rekening penerbit ini berlaku bagi bank dan lembaga nonbank, sehingga masih diperlukan sebuah regulasi yang lebih komprehensif dan rinci yang mengatur tentang bagaimana pemisahan dana *float* pengguna uang elektronik.

LPS sebagai penjamin simpanan nasabah baik dapat mengembangkan kewenangannya ke ranah *financial technology*, terutama bagi penerbit uang elektronik. Hal ini dikarenakan pertumbuhan fintech dan dana *float* juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Pertumbuhan dana *float* per februari 2023 dengan total 10.7 triliun dengan rincian dana float di bank sebesar 3.6 Triliun dan dana *float* di lembaga non bank 7.1 triliun.[[30]](#footnote-29) Pertumbuhan dana *float* yang semakin tinggi di sektor lembaga non bank harus bisa memberikan kenyamanan dan keamanan terutama bagi pengguna uang elektronik agar dana ini tidak dapat diganggu dengan berbagai resiko yang ada. Hal ini memperkuat, alasan mengapa LPS harus juga memberikan jaminan keuangan bagi pengguna uang elektronik.

### C. Penutup

Dana *float* masih kurang diatur dalam hukum positif di Indonesia saat ini, baik dalam Peraturan Bank Indonesia maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini berakibat pada banyaknya permasalahan dana *float* yang belum bisa teratasi karena tidak ada payung hukumnya sehingga dapat membahayakan pengguna uang elektronik. Saat ini, terdapat kesenjangan pengaturan antara lembaga bank dan nonbank sebagai penyelenggara dana *float* oleh LPS. Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia tertinggal dalam perkembangan dana float, terutama pada kaitannya dengan fintech.

Negara lain menerapkan tiga mekanisme yang dapat dilakukan seperti asuransi simpanan, adanya persyaratan modal, atau persyaratan yang terdiversifikasi. Penulis memberikan solusi untuk memperluas kewenangan LPS dengan menjamin dana *float* pada fintech seperti pada lembaga bank, yang meliputi likuiditas, kredit, hukum, hingga operasional. Pemerintah diharapkan dapat memperbarui peraturan yang sudah ada guna melindungi pengguna uang elektronik agar uangnya tidak dapat ditarik dalam boedel pailit ketika terjadi *insolvency*.

**Bibliografi**

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Bank Indonesia, P*eraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik*. PBI No.20/6/PBI/2018.

Bank Indonesia. “Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan,” diakses 25 April 2023, Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Maret 2023 (bi.go.id).

Franedya, Roy dan Tito Bosnia, “Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia!”, CNBC Indonesia, diakses 25 April 2023,<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>.

Fullarton, Alexander. *The Common Law and Taxation of Trusts in Australia in the Twenty-First Century*. Australia. 2006.

Hendarsyah, Decky. “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no.1, (2016): 3

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* UU No. 37 Tahun 2004, LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No. 24 Tahun 2004, LN. 2004/ No. 96, TLN NO. 4420.

Indonesia, *Undang - Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.* UU No. 4 Tahun 2023,LN.2023/No.4, TLN No.6845.

Juani, Rohman. “Penggunaan Uang Jaminan Lelang berupa Uang Elektronik Berbasis Server,” *Kementerian Keuangan.* Diakses pada tanggal 24 April 2023 melalui. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15691/Penggunaan-Uang-Jaminan-Lelang-berupa-Uang-Elektronik-Berbasis-Server.html#:~:text=Contoh%20uang%20elektronik%20berbasis%20chip,%2C%20GoPay%2C%20Dana%20dan%20ShopeePay).

OCBC NISP, “Mengenal Aset Likuid: Pengertian, Contoh & Peran Pentingnya,” diakses 18 april 2023.<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/05/aset-likuid-adalah#:~:text=Pengertian%20aset%20likuid%20adalah%20kekayaan,diakses%20tanpa%20memberi%20penurunan%20nilai>.

Oliveros, Rosa M dan Lucia Pacheco, “Protection of Customers Funds in Electronic Money: a myriad of regulatory approaches,” *Financial Inclusion Watch* (28 October 2006) : 1 - 13.

Perpajakan Ddtc, “Ring Fencing”. diakses 18 Maret 2023. <https://perpajakan.ddtc.co.id/glosarium-pajak/ring-fencing>.

Sari, Rizky Kartika. “Perlindungan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik untuk Memitigasi Risiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik”. *Jurnal Dharmasisya*. Vol. 1. No. 3. (2021).

Soerjono dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Tarazi, Michael dan Paul Breloff. “Nonbank E-Money Issuers: Regulatory Approaches to Protecting Customer Funds”. *CGAP Journal*. No. 63. (2010).

Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal Transplantasi Trust dalam KUHPerdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia.* Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

1. \* Alamat korespondensi: [haura.atthaya.salsabilla@mail.ugm.ac.id](mailto:haura.atthaya.salsabilla@mail.ugm.ac.id) [↑](#footnote-ref-0)
2. \*\* Alamat korespondensi: [pramita.putri2703@mail.ugm.ac.id](mailto:pramita.putri2703@mail.ugm.ac.id) [↑](#footnote-ref-1)
3. Decky Hendarsyah, “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no.1, (2016) : 3 [↑](#footnote-ref-2)
4. Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Hukum.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29. [↑](#footnote-ref-3)
5. Soerjono dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), 23. [↑](#footnote-ref-4)
6. Rizky Kartika Sari, “Perlindungan Dana *Float* Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik untuk Memitigasi Risiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik”. *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1, No. 3, (2021), hal. 1421-1436. [↑](#footnote-ref-5)
7. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 48. [↑](#footnote-ref-6)
8. *Ibid,* Pasal 49. [↑](#footnote-ref-7)
9. *Ibid,* Pasal 50. [↑](#footnote-ref-8)
10. Indonesia, Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 215 Ayat 3. [↑](#footnote-ref-9)
11. *Ibid,* Pasal 219. [↑](#footnote-ref-10)
12. Roy Franedya dan Tito Bosnia, “Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia!”, CNBC Indonesia, diakses 25 April 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> [↑](#footnote-ref-11)
13. Indonesia, Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 Ayat 2. [↑](#footnote-ref-12)
14. *Ibid*, Pasal 24. [↑](#footnote-ref-13)
15. *Ibid,* Pasal 21. [↑](#footnote-ref-14)
16. Bank Indonesia, “Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan,” diakses 25 April 2023, [Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Maret 2023 (bi.go.id)](https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Pages/SPIP-Maret-2023.aspx) [↑](#footnote-ref-15)
17. Indonesia, Undang - Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 8 Ayat 1. [↑](#footnote-ref-16)
18. *Ibid,* Pasal 10. [↑](#footnote-ref-17)
19. *Ibid*, Pasal 11 ayat (1). [↑](#footnote-ref-18)
20. Indonesia, Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 35D ayat (1). [↑](#footnote-ref-19)
21. *Ibid,* Pasal 35D ayat (2). [↑](#footnote-ref-20)
22. Rohman Juani, “Penggunaan Uang Jaminan Lelang berupa Uang Elektronik Berbasis Server,” *Kementerian Keuangan.* Diakses 24 April 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15691/Penggunaan-Uang-Jaminan-Lelang-berupa-Uang-Elektronik-Berbasis-Server.html#:~:text=Contoh%20uang%20elektronik%20berbasis%20chip,%2C%20GoPay%2C%20Dana%20dan%20ShopeePay>**.**  [↑](#footnote-ref-21)
23. Rosa M. Oliveros, Lucia Pacheco, “Protection of Customers Funds in Electronic Money: a myriad of regulatory approaches,” *Financial Inclusion Watch* (28 October 2006). hlm: 2. [↑](#footnote-ref-22)
24. Perpajakan Ddtc, “*Ring Fencing*”. diakses 18 Maret 2023. [https://perpajakan.ddtc.co.id/](https://perpajakan.ddtc.co.id/glosarium-pajak/ring-fencing). [↑](#footnote-ref-23)
25. *Op cit*, hal. 12 [↑](#footnote-ref-24)
26. *Op Cit.* hal. 9 [↑](#footnote-ref-25)
27. OCBC NISP, “Mengenal Aset Likuid: Pengertian, Contoh & Peran Pentingnya,” diakses 18 april 2023. [https://www.ocbcnisp.com/id/article/](https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/05/aset-likuid-adalah#:~:text=Pengertian%20aset%20likuid%20adalah%20kekayaan,diakses%20tanpa%20memberi%20penurunan%20nilai). [↑](#footnote-ref-26)
28. Michael Tarazi dan Paul Breloff, “Nonbank E-Money Issuers: Regulatory Approaches to Protecting Customer Funds”, *CGAP Journal*, No. 63, (2010), hal. 1-10. [↑](#footnote-ref-27)
29. Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia,* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hal.11. [↑](#footnote-ref-28)
30. Bank Indonesia, “Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan,” diakses 25 April 2023, [Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Maret 2023 (bi.go.id)](https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Pages/SPIP-Maret-2023.aspx). [↑](#footnote-ref-29)